

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hampir semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu *profit oriented*. Dimana perusahaan mengharapkan dengan modal yang seminimal mungkin mendapatkan laba yang maksimal, akan tetapi harapan perusahaan tersebut dapat terhambat dengan segala kemungkinan yang terjadi sehingga memunculkan suatu permasalahan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat diakibatkan oleh pengaruh ekstern perusahaan maupun intern perusahaan. Biasanya didalam suatu perusahaan tidak sedikit munculnya penyimpangan, baik yang bersifat kerugian dari proses produksi maupun denda administrasi.

Begitupun halnya pada PT Bio Farma, dari hasil pengamatan sumber data <http://www.biofarma.co.id> yang di *download* tanggal 15 Februari 2007, dikatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap PT Bio Farma oleh BPK untuk tahun buku 2004 dan 2005. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdapat nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp 9,46 miliar dengan rincian temuan yang berindikasikan kerugian sebesar Rp 2,53 miliar dan yang bersifat administratif sebesar Rp 6,93 miliar. Ini merupakan suatu penyimpangan, baik penyimpangan secara keilmuan maupun penyimpangan secara aturan-aturan yang berlaku.

Terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan kerugian pada PT Bio Farma, yaitu:

a. PT Bio Farma telah mengadakan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Inkor Husada Utama (PT IHU) untuk mengoperasikan pabrik Vaksin Hepatitis B yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO-BI) pada tanggal 30 September 1994 dengan jangka waktu selama 10 tahun. Pada tahun 2002 KSO-BI dihentikan kegiatannya karena adanya perubahan teknologi dan kebutuhan pasar untuk vaksin Hepatitis B, sehingga tenaga kerja bagian produksi KSO BI telah dikembalikan ke PT Bio Farma sejak 31 Desember 2002. Menteri BUMN secara prinsip menyetujui usulan penghentian KSO-BI sesuai dengan surat No.S-111/MBU/2003 tanggal 17 Maret 2003. Sesuai laporan appraisal independen, nilai aset KSO-BI tersebut per 27 Agustus 2002 adalah sebesar Rp29,32 miliar. Proses pengambilalihan aset KSO-BI sampai saat pemeriksaan berakhir 28 Oktober 2005 belum dilaksanakan karena belum ada kesepakatan antara PT Bio Farma, PT IHU dan pihak bank yang memberi kredit dengan jaminan aset yang berada di atas tanah KSO-BI.

Berdasarkan laporan keuangan PT IHU per 30 Juni 2002 (*unaudit*), jumlah aktiva perusahaan sebesar Rp50,82 miliar dan hutang sebesar Rp60,82 miliar. Sementara dalam laporan keuangan per 31 Desember 2001 (*audited*) diungkapkan bahwa aktiva tetap bangunan yang berada di atas tanah perusahaan (KSO-BI) dijamin oleh PT IHU untuk jaminan kredit kepada Roxan Services Ltd. yang terdaftar di British Virgin Islands. Kondisi tersebut mengakibatkan PT Bio Farma tidak bisa memanfaatkan aset berupa tanah seluas 4.000 m² yang masih dikuasai PT IHU.

b. Sehubungan dengan *delisted-nya* prakualifikasi dari World Health Organization, PT Bio Farma telah melakukan langkah perbaikan diantaranya penunjukan langsung atas pengadaan jasa konsultan kepada David Buckley & Associates Pty. Ltd. dan Nadir Harjee yang diikat dengan perjanjian konsultasi tanggal 14 Maret 2005 dan tanggal 1 Desember 2004. Penunjukan David Buckley & Associates Pty. Ltd. untuk memperbaiki Sistem Jaminan Mutu (*Quality Assurance System*) dan Nadir Harjee karena yang bersangkutan adalah ahli dibidang *pertusis*, *difteri* dan *tetanus*. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas pengadaan jasa konsultansi tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut.

David Buckley

Pada tahun 2005 PT Bio Farma telah melakukan pembayaran atas *fee* jasa konsultan kepada David Buckley sebesar Rp1,46 miliar, dan biaya akomodasi sebesar Rp0,16 miliar. Sesuai Surat Persetujuan Konsultasi 14 Maret 2005 diketahui bahwa *fee* yang dibayarkan terbebas dari pajak-pajak yang berlaku di Indonesia. Atas transaksi ini, PT Bio Farma tidak menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan jasa konsultan dari David Buckley. Besarnya *fee* yang diperhitungkan untuk tujuan perpajakan adalah sebesar Rp1,46 miliar sehingga besarnya PPN yang belum disetorkan ke kas Negara dan dilaporkan adalah sebesar Rp0,14 miliar. Atas kelalaian dalam penyetoran PPN tersebut, perusahaan berpotensi dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Nadir Harjee

PT Bio Farma telah melakukan pembayaran atas jasa konsultasi dan akomodasi kepada Nadir Harjee sebesar Rp1,24 miliar. Tahun 2004 sebesar Rp0,42 miliar dengan rincian sebesar Rp0,18 miliar untuk akomodasi dan sebesar Rp0,24 miliar untuk *fee* konsultan. Tahun 2005 sebesar Rp0,41 miliar dengan rincian sebesar Rp0,18 miliar untuk akomodasi dan sebesar Rp0,23 miliar untuk *fee* konsultan. Jumlah *fee* yang dibayarkan tersebut tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku di Indonesia. Perusahaan belum melakukan penyetoran dan melaporkan PPN tersebut.

Besarnya *fee* yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak sebesar Rp0,83 miliar, sehingga besarnya PPN yang belum disetorkan sebesar Rp0,08 miliar. Kemudian besarnya potensi pengenaan sanksi denda atas kelambatan penyetoran PPN atas jasa konsultasi dari Nadir Harjee adalah sebesar Rp0,01 miliar. Lebih lanjut diketahui bahwa kedua konsultan tersebut tidak mempunyai ijin bekerja dari Departemen Tenaga Kerja. Hal ini berarti PT Bio Farma dalam mempekerjakan tenaga asing tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Kondisi tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: (a) Penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam hal ini PPN kurang diterima sebesar Rp0,23 miliar, (b) PT Bio Farma tidak mempunyai pedoman dalam melakukan pembayaran, dan (c) PT Bio Farma berpotensi dikenakan sanksi denda atas kelambatan penyetoran PPN sebesar Rp0,02 miliar.

c. PT Bio Farma melakukan penjualan ke Departemen Kesehatan (Depkes) pada tahun 2004 dan tahun 2005 (s.d. Agustus) masing-masing adalah sebesar Rp264,28 miliar dan Rp213,86 miliar. Atas penjualan tersebut, PT Bio Farma berhak menerima pembayaran dari Depkes dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan (Ditjen PPM & PL). Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap atau keseluruhan berdasarkan Surat Pengantar Vaksin dan Berita Acara Penerimaan Barang. Untuk Alokasi Daerah, Berita Acara Penerimaan dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Vaksin atau Pejabat Struktural yang berwenang pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi yang ditunjuk. Untuk Alokasi Pusat, Berita Acara Penerimaan dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Barang/Jasa Direktorat Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Masyarakat Ditjen PPM & PL Depkes. Untuk menunjang penjualan ke Depkes tersebut, PT Bio Farma melaksanakan kegiatan monitoring yang ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 06862/Dir/IX/2002 tanggal 11 September 2002. Selain itu, PT Bio Farma telah menetapkan prosedur pertanggungjawaban Dana Monitoring. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan monitoring pemasaran tahun 2004 dan tahun 2005 (s.d. Agustus) masing-masing sebesar Rp4,40 miliar dan Rp1,05 miliar. Biaya tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2004 dan tahun 2005 yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing pada 19 Desember 2003 dan 27 Januari 2005. Pertanggungjawaban atas bukti-bukti penyetoran tersebut sudah sesuai dengan Prosedur Administrasi Biaya

Monitoring yang ditetapkan dengan SK Direksi PT Bio Farma No.06862/Dir/IX/2002, namun ditinjau dari sisi *Good Corporate Government* yang kini digalakkan diseluruh Badan Usaha Milik Negara, prosedur yang sudah ada masih belum memperhatikan aspek transparansi. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran dana sebesar Rp5,45 miliar belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, walaupun sudah ada di RKAP tahun 2004 dan tahun 2005.

- d. PT Bio Farma menunjuk beberapa distributor untuk penjualan vaksin dan serum produksi untuk kebutuhan dalam negeri non pemerintah. Salah satu distributor, PT Mitra Medika Pharmalab (PT-MMP), mempunyai saldo hutang per 31 Desember 2004 sebesar Rp1,13 miliar, yang berumur lebih dari 151 hari. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa piutang kepada PT-MMP sebesar Rp1,13 miliar sudah macet sejak 28 Januari 2003 dan besar kemungkinan tidak tertagih. Penjualan kepada PT-MMP dimulai sejak 5 Nopember 2002 sampai dengan 23 September 2003 dengan nilai sebesar Rp2,09 miliar. Pembayaran piutang yang sudah diterima PT Bio Farma adalah sebesar Rp0,96 miliar, sehingga piutang yang masih harus diterima adalah sebesar Rp1,13 miliar (belum termasuk denda keterlambatan pembayaran). Pembayaran terakhir dilakukan oleh PT-MMP pada 20 Januari 2003, namun demikian PT Bio Farma masih terus melayani penjualan sampai dengan 23 September 2003. PT Bio Farma telah menunjuk Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum untuk penyelesaian piutang kepada PT-MMP secara hukum. Hasil upaya hukum tersebut dibuat surat kuasa untuk menjual tanah dan bangunan milik PT MMP,

namun belum diketahui secara andal berapa nilai wajar dari tanah dan bangunan tersebut. Hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan sebagai angsuran pelunasan kewajiban PT-MMP. Sampai dengan 30 Juni 2005 tanah dan bangunan belum berhasil dijual. Selanjutnya, PT-MMP menandatangani surat kesanggupan melunasi kewajiban dengan jadwal sebagai berikut :

- PT-MMP akan melakukan pembayaran atas pokok kewajiban sebesar Rp1,13 miliar dalam jangka waktu 10 bulan dimulai pada bulan Juni 2004.
- Hasil penjualan tanah dan bangunan akan diperhitungkan sebagai pembayaran setoran per bulan.
- Masalah denda akan dibicarakan kemudian setelah pelunasan kewajiban pokok selesai dilakukan.

PT-MMP ternyata tidak pernah melakukan angsuran pelunasan kewajibannya. Selanjutnya, PT-MMP melalui Direktur Utamanya menyerahkan tanah dan bangunan kepada kuasa hukum PT Bio Farma. Harga tanah dan bangunan tersebut ditaksir sebesar Rp0,25 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2005 belum terdapat upaya hukum lanjutan atas penyerahan tanah dan bangunan tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan dana sebesar Rp1,13 miliar tidak dapat dimanfaatkan.

- e. Berdasarkan laporan keuangan PT Bio Farma tahun buku 2004 diketahui persediaan rusak/kadaluarsa sebesar Rp2,39 miliar, yang terdiri dari persediaan bahan baku/kimia sebesar Rp1,74 miliar dan barang jadi sebesar Rp0,66 miliar. Persediaan rusak tersebut telah dihapusbukukan dari catatan PT Bio Farma dan telah dibebankan sebagai biaya dalam tahun buku 2004. Berdasarkan

pemeriksaan atas dokumen pengadaan bahan kimia yang dinyatakan rusak/kadaluarsa tersebut diketahui bahwa terdapat bahan kimia yang telah rusak/kadaluarsa tersebut merupakan penerimaan dari pembelian selama bulan Agustus 2001, karena pengadaan bahan kimia tersebut tidak memperhatikan masa kadaluarsa (kurang dari tiga tahun). Bahan kimia tersebut hanya digunakan pada tahun 2002 dan 2003.

Untuk pemakaian tahun 2004 perusahaan melakukan pengadaan bahan kimia baru, namun tidak mengacu pada rencana kebutuhan pemakaian bahan kimia, seperti hal-hal berikut :

- Medium 199 E Gibco diterima sebanyak 10.000 liter, sedangkan rata-rata pemakaian sebanyak 1.200 liter per tahun atau pengadaan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan produksi selama 8,33 tahun.
- MEM Gibco diterima sebanyak 10.000 liter, sedangkan rata-rata pemakaian sebanyak 2.695 liter per tahun atau pengadaan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan produksi selama 3,71 tahun.
- BME Gibco diterima sebanyak 50.000 liter, sedangkan rata-rata pemakaian sebanyak 13.630 liter per tahun atau pengadaan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan produksi selama 3,67 tahun.
- Medium 199 in Hank Gibco diterima sebanyak 5.000 liter, sedangkan rata-rata kebutuhan sebanyak 758 liter per tahun atau pengadaan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan produksi selama 6,60 tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadaan bahan kimia melebihi kebutuhan produksi dan perusahaan mengalami kerugian minimal sebesar Rp1,74 miliar.

Kerugian-kerugian diatas layak untuk dianalisis apa saja penyebabnya. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisis mengenai kerugian yang terjadi pada persediaan, dikarenakan bahwa persediaan merupakan pos yang utama dalam neraca dan terkadang merupakan pos yang terbesar dalam susunan perkiraan termasuk dalam modal kerja.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002: 141-142) persediaan adalah aktiva :

- a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan;
- c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Perusahaan seperti PT Bio Farma tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya persediaan bahan baku. Indikasi faktor penyebab kerugian pada persediaan bahan baku di PT Bio Farma adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan persediaan bahan baku tersebut tidak memperhatikan masa kadaluarsa.
- b. Perusahaan melakukan pengadaan bahan kimia baru, namun tidak mengacu pada rencana kebutuhan pemakaian persediaan bahan baku.
- c. Kurang memadainya peran pelaksanaan internal audit.
- d. Kurang efektifnya pengendalian intern persediaan bahan baku.
- e. Profesionalisme yang kurang dimiliki oleh bagian pengelolaan persediaan.

Indikasi faktor penyebab tersebut hendaknya dapat ditelusuri dengan pasti apakah benar merupakan penyebab dari kerugian persediaan atau bukan. Menurut Bambang Hartadi (1999: 19) bahwa:

Perusahaan yang masih mempunyai ukuran relatif kecil dimana operasi atau kegiatan perusahaan dapat dikerjakan beberapa orang, pemilik atau pemimpin dapat mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan secara langsung. Tetapi setelah perusahaan berkembang menjadi besar maka partisipasi pemilik atau pemimpin tidak dapat seperti keadaan perusahaan ketika masih kecil, karena ketika perusahaan telah meluas sedemikian rupa sehingga struktur organisasi menjadi lebih kompleks. Dengan adanya permasalahan baru tersebut manajemen perlu mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang ke tingkatan supervisi yang ada. Dengan demikian manajemen dituntut untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, mencegah serta menentukan kesalahan dan penyimpangan. Untuk kepentingan tersebut maka dibutuhkan perencanaan strategi dan pengendalian intern. Sedangkan pemeriksaan intern (internal audit) merupakan faktor penting yang sangat diperlukan dan merupakan alat untuk menilai efektivitas prosedur yang telah digariskan, dan apakah prosedur tersebut ditaati (efektivitas pengendalian intern).

Berdasarkan uraian diatas, maka peranan pelaksanaan internal audit dibutuhkan dalam rangka pengawasan prosedur sistem pengendalian yang telah ada. Seperti halnya pada PT Bio Farma yang merupakan perusahaan farmasi yang besar yang membutuhkan pengawasan independen diluar manajemen karena memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Maka indikasi faktor penyebab kerugian persediaan kemungkinan besar terletak pada peranan pelaksanaan internal audit dan efektivitas pengendalian intern yang harus diteliti.

Menurut Bambang Hartadi (1999: 20), pengertian internal audit adalah: “Pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen.”

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2002: 20) dalam bukunya mendefinisikan internal audit sebagai berikut:

Internal audit merupakan suatu fungsi yang ada didalam organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau

program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya kegiatan/aktivitas/program.

Sedangkan pengendalian intern menurut Mulyadi (2001: 163), sebagai berikut:

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan internal audit menurut Bambang Hartadi adalah membantu tingkatan manajemen agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif yaitu dengan mengajukan analisa-analisa, penilaian-penilaian, saran-saran dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian persediaan bahan baku dapat dilakukan pengendalian intern terhadap persediaan bahan baku dalam segala tindakan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan proses pembelian dan pemakaian persediaan bahan baku. Dengan adanya pengendalian intern diharapkan harta perusahaan dapat terjaga, data akuntansi dapat dipercaya, dapat meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan. Salah satu unsur guna menunjang efektivitas pengendalian intern adalah adanya internal audit yang merupakan suatu bagian yang bekerja secara independen sehingga dapat menilai segala sesuatunya secara obyektif.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi internal audit adalah sebagai alat bagi manajemen untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan prosedur

pengendalian intern perusahaan, dan hasil outputnya adalah berupa saran dan rekomendasi bagi kepentingan manajemen.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka dirasakan perlu adanya penelitian mengenai peranan pelaksanaan internal audit dan efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku. Oleh karena itu, penulis mengambil judul untuk penyusunan penelitiannya yaitu **“Analisis Pelaksanaan Internal Audit dan Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Bahan Baku di PT Bio Farma (Persero)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti telah diuraikan diatas bahwa persediaan merupakan suatu asset perusahaan penting. Oleh karena itu perlu diadakan pengendalian intern yang memadai, baik secara fisik maupun pencatatannya. Kemudian untuk menilai apakah pengendalian intern tersebut memadai serta efektif atau tidaknya, maka diperlukan adanya pelaksanaan internal audit.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, pelaksanaan internal audit harus objektif, oleh karena itu harus merupakan bagian yang independen.

Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1). Bagaimanakah pelaksanaan internal audit atas pengendalian intern persediaan bahan baku perusahaan
- 2). Bagaimana efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku yang dicapai perusahaan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

- 1) Menggambarkan tentang pelaksanaan internal audit atas pengendalian intern persediaan bahan baku di perusahaan.
- 2) Menggambarkan tentang efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku yang dicapai oleh perusahaan.
- 3) Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul mengenai internal audit dan pengendalian intern persediaan bahan baku.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan internal audit atas pengendalian intern persediaan bahan baku perusahaan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku yang diterapkan oleh perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan internal audit atas pengendalian intern persediaan bahan baku. Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan dan kontribusi terhadap teori-teori yang berhubungan dengan mata kuliah akuntansi biaya, audit, akuntansi manajemen, dan manajemen audit.

1.4.2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya internal audit dan pengendalian intern persediaan bahan baku dan memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan dalam menyelenggarakan aktivitas yang ada kaitannya dengan persediaan bahan baku.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perusahaan memiliki dua tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan dan dapat bertahan dalam persaingan yang ketat di dunia usaha. Dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan sebuah kinerja pimpinan yang optimal dan manajemen yang tangguh dalam melakukan tanggung jawabnya mulai dari perencanaan, pengorganisasi, pengarahan dan pengawasan terhadap orang-orang dipimpinya.

Pada perusahaan yang ruang lingkup usahanya kecil, pengawasan dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi jika perusahaan yang besar, pengawasan dan pengendalian akan cukup sulit, karena semakin besar perusahaan semakin besar pula volume kegiatan dan mengingat keterbatasan manusia maka pimpinan puncak akan sulit mengawasi secara langsung. Maka diambil jalan keluarnya yaitu dengan mengadakan pendelegasian wewenang kepada orang yang dianggap kompeten dalam bidang yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut masing-masing individu akan bekerja dalam suatu ruang lingkup yang lebih kecil dan mengerjakan tugas yang telah dibebankan kepadanya secara lebih maksimal.

Akan tetapi dengan pendelegasian wewenang tersebut, masih akan terdapat masalah yang mungkin akan timbul, yaitu apakah wewenang yang dilimpahkan itu telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Untuk mengawasi dan mengevaluasi hal tersebut dan juga mengingat pentingnya nilai persediaan seperti yang telah disebutkan diatas, maka dibutuhkan sesuatu yang dapat mengendalikan perusahaan dengan baik, dapat memberikan informasi dan data operasi perusahaan yang relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya agar perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan tersebut, maka pelaksanaan internal audit diperlukan atas pengendalian intern suatu perusahaan. Dimana dalam suatu aktivitas melibatkan sosok manusia maka kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja sulit untuk dihindarkan. Akan tetapi dengan adanya internal audit ini bukan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadi penyimpangan dan penyelewengan, melainkan untuk menekan terjadinya penyelewengan tersebut.

Begitupun halnya pada PT Bio Farma yang membutuhkan pelaksanaan internal audit dalam menunjang efektivitas pengendalian intern, dalam hal ini peneliti memfokuskan masalah terhadap pengendalian intern persediaan bahan baku. Karena pada PT Bio Farma telah terjadi kerugian persediaan bahan baku. Dalam hal ini, kerugian yang terjadi pada persediaan baku yang diindikasikan sebesar minimal sebesar Rp1,74 miliar.

Persediaan merupakan asset terpenting dalam suatu perusahaan manufaktur karena persediaan sifatnya aktif dan berputar sehingga mempunyai arti penting

bagi kelangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan farmasi seperti PT Bio Farma yang merupakan perusahaan penghasil vaksin, serum, dan lain-lain.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2002: 141-142) adalah sebagai berikut :

Persediaan adalah aktiva :

- d) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- e) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan;
- f) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Standard for the Profesional Practice of Internal Auditing (dalam Bambang Hartadi, 1999: 20) mendefinisikan pemeriksaan intern adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Intern adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen. Tujuan pemeriksaan intern adalah membantu semua tingkatan manajemen agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut pemeriksaan intern menyajikan analisis-analisis, penilaian-penilaian, saran-saran, bimbingan-bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah, dipelajari dan dinilainya.

Tujuan internal audit menurut Bambang Hartadi adalah membantu tingkatan manajemen agar tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif yaitu dengan mengajukan analisa-analisa, penilaian-penilaian, saran-saran dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2002: 20) dalam bukunya mendefinisikan internal audit sebagai berikut:

Internal audit merupakan suatu fungsi yang ada didalam organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau

program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya kegiatan/aktivitas/program.

Fungsi internal audit menurut Hiro Tugiman berfungsi untuk memberikan penilaian dan saran-saran suatu fungsi pengendalian manajemen guna mengukur dan meneliti efisiensi dan efektivitas struktur pengendalian intern yang telah ditetapkan.

Lingkup pekerjaan internal audit harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Dan pelaksanaan kegiatan internal audit menurut Hiro Tugiman (1997: 53-75) meliputi:

- a. Perencanaan audit: audit intern harus merencanakan setiap pemeriksaan.
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: audit intern harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan; pemeriksa intern harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan; pemeriksa intern harus terus meninjau atau melakukan *follow up* untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

Internal audit dilaksanakan oleh staff perusahaan yang terpisah dan bertanggung jawab langsung kepada *top management*. Aktivitas menyangkut dua hal, yaitu pemeriksaan keuangan (*Financial Audit*) dan pemeriksaan operasional (*Operational Audit*).

Menurut Arens (1999: 623) bahwa : “Tujuan menyeluruh dalam audit atas siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menentukan apakah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.”.

Setelah mengetahui pengertian, fungsi, lingkup pekerjaan, serta pelaksanaan internal audit, maka untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai pengendalian intern.

Menurut Mulyadi (2001: 163) definisi pengendalian intern adalah:

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut definisi diatas adalah:

- a. Menjaga kekayaan organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2001: 164) adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Jadi kesimpulannya, pemeriksaan intern merupakan alat bantu pengendalian manajemen dalam melakukan kegiatan penilaian bebas terhadap semua kegiatan perusahaan harus selalu dalam keadaan dinamis dan aktif. Dalam

rangka itu pemeriksa intern dapat menyusun pengendalian intern yang baik dan tepat, mengadakan pengawasan pelaksanaannya, mengukur dan menilai serta memberi saran-saran perbaikan dan komentar-komentar yang sangat diperlukan oleh manajemen. Manajemen yang berkepentingan langsung terhadap pengendalian intern dan pemeriksaan intern harus sadar dan terbuka atas temuan (hasil) pemeriksaan dan saran-saran perbaikan yang diberikannya dan melakukan tindakan segera apa yang harus diperbaikinya. Dengan demikian adanya pengendalian intern yang selalu dinilai, dievaluasi akan menghasilkan suatu keluaran atau *out put* seperti yang diharapkan atau direncanakan manajemen.

1.6 Pertanyaan Penelitian

Penelitian memiliki jenis permasalahan yang berbeda beda. Dalam setiap penelitian tidak selalu menguji hipotesis. Namun tergantung dari jenis permasalahan yang dihadapi. Jika suatu penelitian tidak menguji hipotesis, maka untuk mempertegas permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan dalam suatu problematika penelitian dalam bentuk kalimat tanya, yang biasa disebut pertanyaan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada kerangka pemikiran, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah pokok persoalan yang difokuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

- 1). Bagaimanakah pelaksanaan internal audit atas pengendalian intern persediaan bahan baku perusahaan?
- 2). Bagaimana efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku yang dicapai perusahaan?

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT Bio Farma (Persero) yang beralamat di jalan Pasteur No. 28 Bandung. Adapun waktu penelitiannya adalah sejak bulan Mei 2007 sampai dengan selesai.

